

LAPORAN K I N E R J A



DIREKTORAT
PRASARANA DAN SARANA
TRIWULAN 1
2026



DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah
diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat tersusun Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Prasarana dan Sarana Triwulan I Tahun 2026 ini, yang merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja yang dilakukan oleh Direktorat Prasarana dan Sarana selama kurun waktu dari bulan Januari sampai dengan Maret Tahun 2026 yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Direktur Prasarana dan Sarana tahun 2026.

LKj Direktorat Prasarana dan Sarana Triwulan I Tahun 2026 ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Prasarana dan Sarana, sehingga dapat menjadikan bahan evaluasi serta dapat memberikan umpan balik untuk pencapaian kinerja tahun 2026 atau dapat dijadikan pemicu untuk peningkatan kinerja organisasi serta bahan evaluasi melalui langkah-langkah perbaikan pelayanan yang lebih profesional dan transparan bagi masyarakat.

Demikian laporan ini disajikan semoga dapat bermanfaat dan berguna bagi kemajuan pembangunan kelautan dan perikanan di masa mendatang.

Jakarta, Maret 2026
Plt. Direktur Prasarana dan Sarana,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Irma Minarti HRP

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
IKHTISAR EKSEKUTIF	vi
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	3
1.3. Tugas dan Fungsi.....	3
1.4. Keragaan Sumber Daya Manusia	4
1.5. Permasalahan Utama	6
1.6. Sistematika Laporan Kinerja (LKj).....	6
BAB II	
PERENCANAAN KINERJA	8
2.1. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (DJPB) Tahun 2025 – 2029	8
2.2. Penetapan Kinerja	9
2.3. Pengukuran Capaian Kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana Tahun 2026	12
BAB III	
AKUNTABILITAS KINERJA.....	13
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	13
3.2. Analisis Kinerja.....	15
3.2.1. Terkelolanya Sistem Prasarana dan Sarana Perikanan Budi Daya	15
3.2.1.1. Peralatan/Sarana Perikanan Budi Daya yang disalurkan ke masyarakat	15
3.2.1.2. Pengelolaan Saluran Irigasi Perikanan yang disalurkan ke masyarakat .	17
3.2.1.3. Unit Produsen Pakan dan Obat Ikan yang dibina	20
3.2.1.4. Kebijakan Tata Kelola Bidang Prasarana dan Sarana Budi Daya yang disusun.....	21
3.2.1.5. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Perizinan DJPB.....	22
3.2.1.6. Jumlah Pakan dan Obat Ikan yang diregistrasi.....	23
3.2.2. Terlindunginya Usaha Pembudidayaan Ikan.....	24
3.2.2.1. Rekomendasi bidang lahan pembudidayaan ikan yang akan	

	disertifikasi	24
3.2.2.2.	Pembudidaya skala kecil yang terlindungi usahanya	26
3.2.3.	Meningkatnya Korporasi di Bidang Budi Daya Ikan	28
3.2.3.1.	Jumlah Korporasi Pembudidaya ikan yang dikembangkan	28
3.2.4.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Direktorat Prasarana dan Sarana	29
3.2.4.1.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Ditjen Perikanan Budi Daya	29
3.2.4.2.	Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen Perikanan Budi Daya	30
3.2.4.3.	Indeks Profesionalitas ASN Satker Direktorat Prasarana dan Sarana	30
3.2.4.4.	Nilai pengawasan kearsipan internal Ditjen Perikanan Budi Daya	32
3.2.4.5.	Persentase Layanan Perkantoran	33
3.2.4.6.	Persentase Penyelesaian Penyusunan SOP	34
BAB IV		
PENUTUP		36
4.1.	KESIMPULAN	36
4.2.	REKOMENDASI	36

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1. Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 Direktorat Prasarana dan Sarana .	13
Tabel 3. 2. Peralatan/Sarana Perikanan Budi Daya yang disalurkan ke masyarakat Triwulan I Tahun 2026.....	15
Tabel 3. 3. Target dan pelaksana kegiatan peralatan/sarana perikanan budi daya yang disalurkan ke masyarakat tahun 2026	16
Tabel 3. 4. Pengelolaan Saluran Irigasi Perikanan yang disalurkan ke masyarakat Triwulan I Tahun 2026.....	17
Tabel 3. 5. Calon Lokasi PITAP Tahun 2026	18
Tabel 3. 6. Unit Produsen Pakan dan Obat Ikan yang dibina Triwulan I Tahun 2026 ...	21
Tabel 3. 7. Kebijakan Tata Kelola Bidang Prasarana dan Sarana Budi Daya yang disusun Triwulan I Tahun 2026	22
Tabel 3. 8. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Perizinan DJPB Triwulan I Tahun 2026	23
Tabel 3. 9. Jumlah Pakan dan Obat Ikan yang diregistrasi Triwulan I Tahun 2026.....	24
Tabel 3. 10. Rekomendasi bidang lahan pembudidayaan ikan yang akan disertifikasi Triwulan I Tahun 2026.....	24
Tabel 3. 11. Target Usulan Program SEHAT Tahun 2027	25
Tabel 3. 12. Pembudidaya skala kecil yang terlindungi usahanya Triwulan I Tahun 2026	26
Tabel 3. 13. Data Penebusan Pupuk Bersubsidi Triwulan I Tahun 2026.....	27
Tabel 3. 14. Jumlah Korporasi Pembudidaya Ikan yang Dikembangkan Triwulan I Tahun 2026	28
Tabel 3. 15. Capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Ditjen Perikanan Budi Daya Triwulan I Tahun 2026	29
Tabel 3. 16. Capaian Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen Perikanan Budi Daya Triwulan I Tahun 2026	30
Tabel 3. 17. Persyaratan Kualifikasi Jabatan	31
Tabel 3. 18. Tabel Indikator Dimensi Kompetensi	31
Tabel 3. 19. Capaian Indeks Profesionalitas ASN Satker Direktorat Prasarana dan Sarana.....	32
Tabel 3. 20. Capaian Nilai pengawasan kearsipan internal Ditjen Perikanan Budi Daya	33
Tabel 3. 21. Persentase Layanan Perkantoran Triwulan I Tahun 2026.....	33
Tabel 3. 22. Persentase Penyelesaian Penyusunan SOP Triwulan I Tahun 2026	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	4
Gambar 1. 2. Jumlah pegawai pada Direktorat Prasarana dan Sarana	5
Gambar 1. 3. Jumlah pegawai pada Direktorat Prasarana dan Sarana berdasarkan Jenjang Pendidikan	5
Gambar 1. 4. Jumlah pegawai pada Direktorat Prasarana dan Sarana berdasarkan Pangkat/Golongan.....	6
Gambar 2. 1. Nilai Capaian Kinerja Trwulan 1 Tahun 2026.....	12
Gambar 3. 1. Calon Lokasi PITAP Desa Klayan, Kec. Gunungjati	19
Gambar 3. 2. Calon Lokasi PITAP Desa Muara, Kec. Suranenggala.....	19
Gambar 3. 3. Calon Lokasi PITAP Desa Linduk, Kec. Pontang	20
Gambar 3. 4. Calon Lokasi PITAP Desa Terpayuk, Kec. Tanara	20

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana Triwulan I Tahun 2026 merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dalam aplikasi Kinerjaaku pada Direktorat Prasarana dan Sarana mencapai Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 113,26 % dengan jumlah indikator kinerja sebanyak 15 indikator kinerja dengan rincian seperti terlihat dalam Tabel A.

Tabel A. Indikator Kinerja Organisasi Direktorat Prasarana dan Sarana Tahun 2026

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	CAPAIAN	%
1	Terkelolanya Sistem Prasarana dan Sarana Perikanan Budi Daya	1	Peralatan/Sarana Perikanan Budi Daya yang disalurkan ke masyarakat (Unit)	502	0	0
		2	Pengelolaan Saluran Irigasi Perikanan yang disalurkan ke masyarakat (Unit)	30	0	0
		3	Unit Produsen Pakan dan Obat Ikan yang dibina (Unit)	20	1	5
		4	Kebijakan Tata Kelola Bidang Prasarana dan Sarana Budi Daya yang disusun (Rekomendasi kebijakan)	3	0	0
		5	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Perizinan DJPB (Nilai)	80	92,26	115
		6	Jumlah Pakan dan Obat Ikan yang diregistrasi (Produk)	50	77	154
2	Terlindunginya Usaha Pembudidayaan Ikan	7	Rekomendasi bidang lahan pembudidayaan ikan yang akan disertifikasi (Orang)	1.000	6.540	654
		8	Pembudidaya skala kecil yang terlindungi usahanya (Orang)	375	12.907	3.441
3	Meningkatnya Korporasi di Bidang Budi Daya Ikan	9	Jumlah Korporasi Pembudidaya ikan yang dikembangkan (Kelompok masyarakat)	3	0	0
4	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Prasarana dan Sarana	10	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Ditjen Perikanan Budi Daya (Persen)	86	97,46	113
		11	Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen Perikanan Budi Daya (Nilai)	84,2	0	0

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	CAPAIAN	%
		12	Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Perikanan Budi Daya (Indeks)	81,5	0	0
		13	Nilai pengawasan kearsipan internal Ditjen Perikanan Budi Daya (Nilai)	81	0	0
		14	Persentase Layanan Perkantoran (Persen)	100	100	100
		15	Persentase Penyelesaian Penyusunan SOP (Persen)	100	0	0

Capaian indikator Triwulan I pada tahun 2026 seperti terlihat tabel A menunjukkan bahwa kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana sangat baik karena indikator kinerja utama (IKU) yang periode perhitungannya triwulanan, capaian semua indikator telah terpenuhi.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan perikanan budi daya perlu memiliki perencanaan yang berkualitas, efektif, dan efisien. Sesuai dengan amanat PP No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dilakukan dengan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follow program*) melalui penganggaran berbasis kinerja, serta dengan menggunakan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial.

Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan budi daya, dengan memfokuskan pada pengelolaan sumber daya perikanan budi daya yang berkelanjutan, dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial, tidak hanya semata pada peningkatan produksi saja.

Berdasarkan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Permen PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa setiap kementerian berkewajiban menyusun Laporan Kinerja (LKj) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan Renstra maupun Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang dibuat sebelumnya. LKj juga merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga prinsip pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab (*good governance*) dapat diwujudkan.

Terkait dengan kebijakan tersebut Direktorat Prasarana dan Sarana, berupaya untuk mendukung kebijakan tersebut melalui pemenuhan target dan sasaran Indikator

Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2026 yang telah dituangkan dalam Penetapan Kinerja 2026 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. 1. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Tahunan Direktorat Prasarana dan Sarana Tahun 2026

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	CAPAIAN	%
1	Terkelolanya Sistem Prasarana dan Sarana Perikanan Budi Daya	1	Peralatan/Sarana Perikanan Budi Daya yang disalurkan ke masyarakat (Unit)	502	0	0
		2	Pengelolaan Saluran Irigasi Perikanan yang disalurkan ke masyarakat (Unit)	30	0	0
		3	Unit Produsen Pakan dan Obat Ikan yang dibina (Unit)	20	1	5
		4	Kebijakan Tata Kelola Bidang Prasarana dan Sarana Budi Daya yang disusun (Rekomendasi kebijakan)	3	0	0
		5	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Perizinan DJPB (Nilai)	80	92,26	115
		6	Jumlah Pakan dan Obat Ikan yang diregistrasi (Produk)	50	77	154
2	Terlindunginya Usaha Pembudidayaan Ikan	7	Rekomendasi bidang lahan pembudidayaan ikan yang akan disertifikasi (Orang)	1.000	6.540	654
		8	Pembudidaya skala kecil yang terlindungi usahanya (Orang)	375	12.907	3.441
3	Meningkatnya Korporasi di Bidang Budi Daya Ikan	9	Jumlah Korporasi Pembudidaya ikan yang dikembangkan (Kelompok masyarakat)	3	0	0
4	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Prasarana dan Sarana	10	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Ditjen Perikanan Budi Daya (Persen)	86	97,46	113
		11	Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen Perikanan Budi Daya (Nilai)	84,2	0	0
		12	Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Perikanan Budi Daya (Indeks)	81,5	0	0
		13	Nilai pengawasan kearsipan internal Ditjen Perikanan Budi Daya (Nilai)	81	0	0
		14	Persentase Layanan Perkantoran (Persen)	100	100	100

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	CAPAIAN	%
	15 Persentase Penyelesaian Penyusunan SOP (Persen)	100	0	0

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan laporan kinerja (LKj) Direktorat Prasarana dan Sarana Triwulan I Tahun 2026 ini adalah sebagai bahan laporan pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Prasarana dan Sarana dan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan terhadap pencapaian target IKU di tahun 2026 dimana target tahunan dapat terpenuhi secara sempurna.

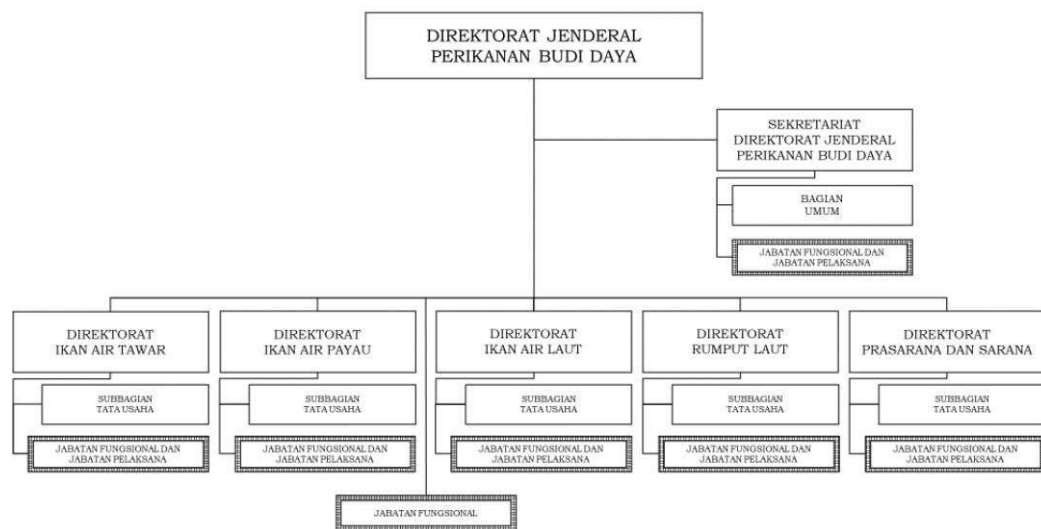
1.3. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Permen No.2 Tahun 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 165, Direktorat Prasarana dan Sarana mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang standardisasi perikanan budi daya, pengelolaan prasarana dan sarana pembudidayaan ikan, dan pengelolaan usaha perikanan budi daya serta perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169, Direktorat Prasarana dan Sarana menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan kebijakan di bidang standardisasi perikanan budi daya, pengelolaan prasarana dan sarana pembudidayaan ikan, dan pengelolaan usaha perikanan budi daya serta perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi perikanan budi daya, pengelolaan prasarana dan sarana pembudidayaan ikan, dan pengelolaan usaha perikanan budi daya serta perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan;
- Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi perikanan budi daya, pengelolaan prasarana dan sarana pembudidayaan ikan, dan pengelolaan usaha perikanan budi daya serta perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan;
- Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi perikanan budi

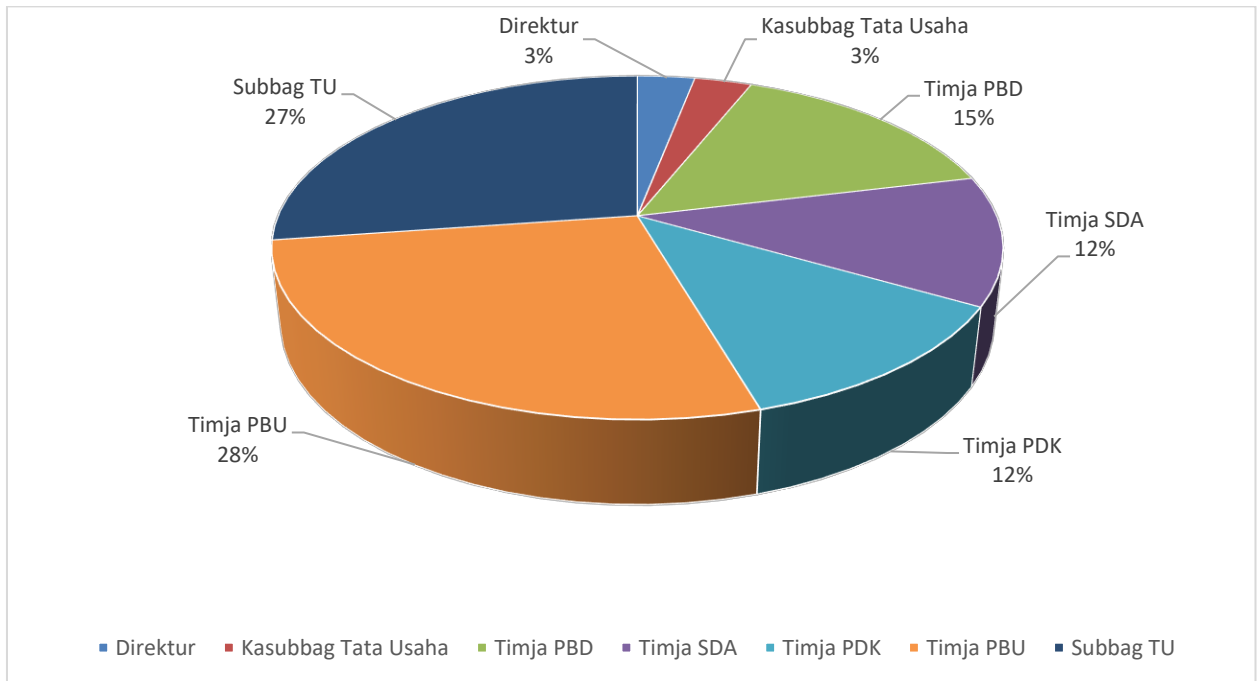
- daya, pengelolaan prasarana dan sarana pembudidayaan ikan, dan pengelolaan usaha perikanan budi daya serta perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan;
- e. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang standardisasi perikanan budi daya, pengelolaan prasarana dan sarana pembudidayaan ikan, dan pengelolaan usaha perikanan budi daya serta perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan; dan
 - f. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Prasarana dan Sarana.



Gambar 1. 1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya

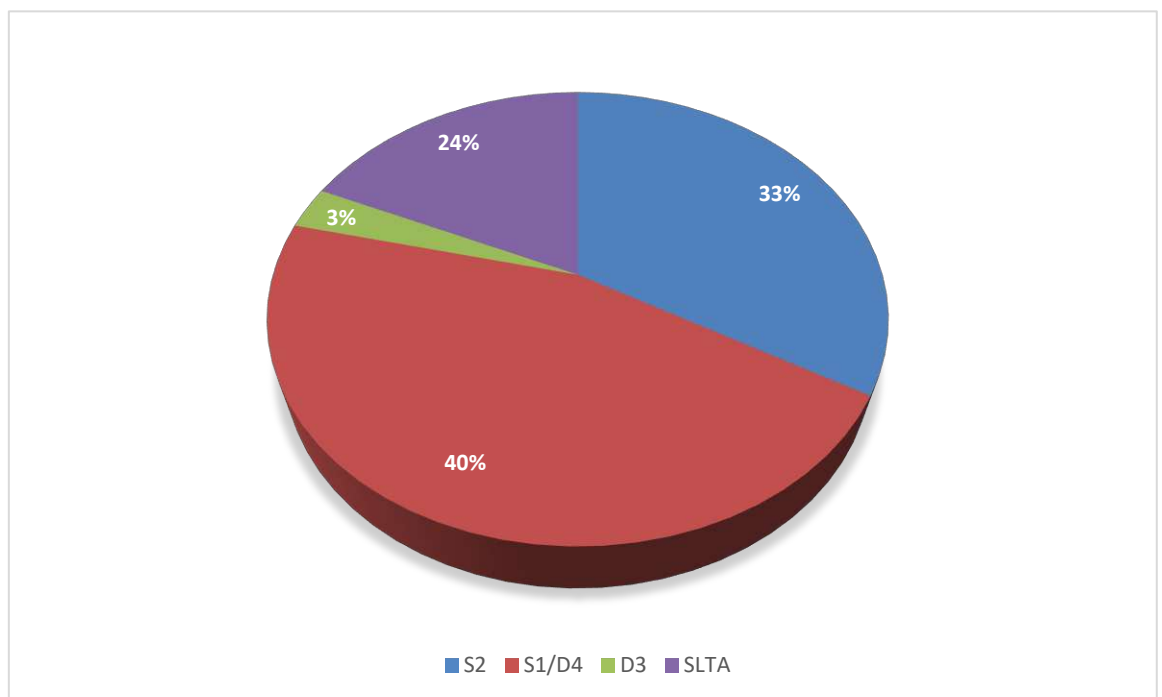
1.4. Keragaan Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) memegang peranan penting dalam mendukung program dan kegiatan. Pada Tahun 2026, jumlah pegawai pada Direktorat Prasarana dan Sarana adalah 33 pegawai (31 PNS dan 1 PPPK Penuh Waktu, dan 1 PPPK Paruh Waktu). Pegawai Direktorat Prasarana dan Sarana terdiri dari Direktur, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan 31 pegawai tersebar pada 4 Tim Kerja lainnya, yaitu: (i) Tim Kerja Peralatan Budi Daya sebanyak 5 pegawai, (ii) Tim Kerja Sumber Daya Air sebanyak 4 pegawai, (iii) Tim Kerja Pembiayaan dan Kelembagaan sebanyak 4 pegawai, (iv) Tim Kerja Pelayanan Berusaha sebanyak 9 pegawai, (v) Subbagian Tata Usaha sebanyak 9 pegawai.



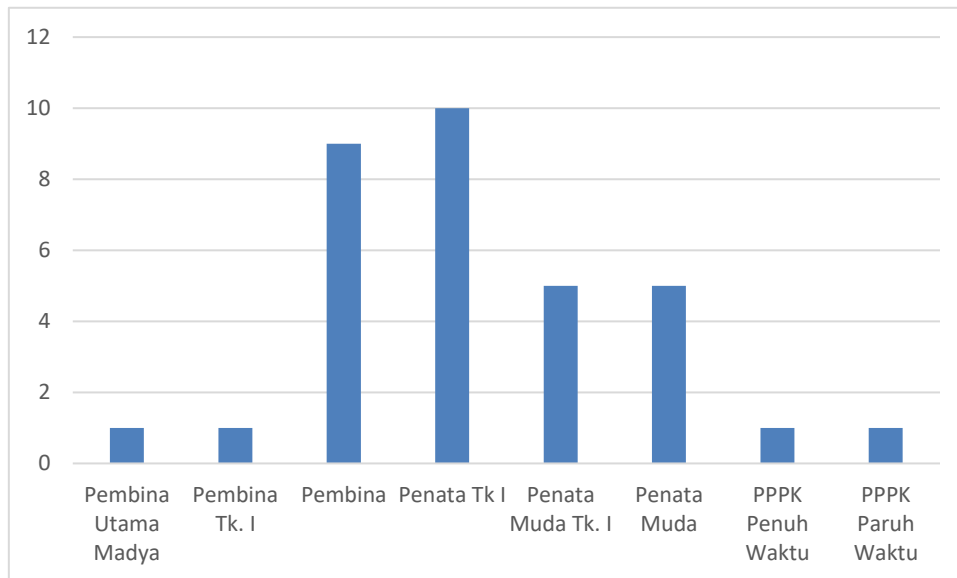
Gambar 1. 2. jumlah pegawai pada Direktorat Prasarana dan Sarana

Berdasarkan jenjang pendidikannya, pegawai pada Direktorat Prasarana dan Sarana terdiri dari: (i) Lulusan S-2 berjumlah 11 pegawai; (ii) Lulusan S-1/D-4 berjumlah 15 pegawai; (iii) Lulusan D-3 berjumlah 1 pegawai; (iv) /SLTA berjumlah 6 pegawai.



Gambar 1. 3. Jumlah pegawai pada Direktorat Prasarana dan Sarana berdasarkan Jenjang Pendidikan

Berdasarkan pangkat/golongan ruang, pegawai pada Direktorat Prasarana dan sarana terdiri dari : (i) Pembina Utama Madya berjumlah 1 pegawai; (ii) Pembina Tk. I berjumlah 1 pegawai; (iii) Pembina berjumlah 9 pegawai; (iv) Penata Tk. I berjumlah 10 pegawai; (v) Penata Muda Tk. I berjumlah 5 pegawai; (vi) Penata Muda berjumlah 5 pegawai; (vii) PPPK Penuh Waktu berjumlah 1 pegawai, dan (viii) PPPK Paruh Waktu berjumlah 1 pegawai.



Gambar 1. 4. jumlah pegawai pada Direktorat Prasarana dan Sarana berdasarkan Pangkat/Golongan

Direktorat Prasarana dan Sarana saat ini memiliki dua (2) pejabat fungsional Pengelola Kesehatan Ikan, sembilan (9) pejabat fungsional Analis Akuakultur, empat (4) pejabat fungsional Penata Perizinan dan satu (1) orang Analis SDM Aparatur.

1.5. Permasalahan Utama

Secara umum permasalahan/kendala yang dihadapi dalam Kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana yaitu masih belum meratanya prasarana dan sarana budi daya yang ada di Indonesia, sehingga dibutuhkan koordinasi dengan stakeholder terkait untuk membangun prasarana dan sarana budi daya di Indonesia.

1.6. Sistematika Laporan Kinerja (LKj)

Laporan kinerja (LKj) ini secara umum memuat target dan capaian kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana pada tahun 2026. Sebagai tolok ukur keberhasilan

kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana, LKj ini menginformasikan target dan capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2026.

Adapun sistematika penyajian laporan adalah sebagai berikut:

1. **Ikhtisar Eksekutif**, bagian ini menyajikan gambaran menyeluruh secara ringkas tentang capaian kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana pada tahun 2026.
2. **Bab I Pendahuluan**, pada bab ini disajikan hal-hal umum tentang Ditjen Perikanan Budi Daya serta uraian singkat tentang tugas pokok dan fungsi Direktorat Prasarana dan Sarana termasuk latar belakang, maksud dan tujuan penulisan LKj.
3. **Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja**, pada bab ini disajikan rencana strategis, gambaran singkat mengenai kebijakan pembangunan perikanan budi daya, rencana kerja dan anggaran tahun 2026, serta penetapan kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana.
4. **Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan**, pada bab ini disajikan prestasi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Prasarana dan Sarana serta evaluasi dan analisis kinerja tahun 2026. Dalam bab ini juga disampaikan akuntabilitas keuangan yang mencakup alokasi dan realisasi anggaran termasuk pula penjelasan tentang kinerja anggaran.
5. **Bab IV Penutup**, pada bab ini disajikan tinjauan secara umum tentang keberhasilan, kegagalan serta permasalahan dan kendala utama. Dalam bab ini juga disampaikan saran pemecahan masalah yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya.
6. **Lampiran**, pada bab ini berisi data dukung yang diperlukan dalam penjelasan/ pembahasan dari Bab I sampai dengan Bab III.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (DJPB) Tahun 2025 – 2029

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya Nomor 473 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (DJPB) Tahun 2025 – 2029 bahwa Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (DJPB) Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman pembangunan perikanan budi daya nasional dalam lima tahun ke depan, selaras dengan RPJMN 2025–2029 dan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan. Renstra ini merupakan bagian awal pelaksanaan RPJPN 2025–2045 untuk mendukung terwujudnya Visi Indonesia Emas 2045. Renstra DJPB menjadi acuan bagi unit kerja pusat dan daerah dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi pembangunan perikanan budi daya. Fokus utama diarahkan pada peningkatan produksi yang berkelanjutan, penguatan daya saing, serta peningkatan kesejahteraan pembudi daya ikan.

Evaluasi kinerja periode 2020–2024 menunjukkan bahwa sektor perikanan budi daya mengalami pertumbuhan positif. Produksi nasional tumbuh rata-rata sekitar 1,5% per tahun dengan kontribusi terbesar dari komoditas rumput laut. Komoditas strategis seperti udang, nila, lele, patin, dan ikan hias menunjukkan tren peningkatan, meskipun sebagian belum mencapai target akibat dampak pandemi COVID-19, keterbatasan infrastruktur, kebijakan tata ruang, serta kendala pasar dan biaya produksi.

Dari sisi kesejahteraan, pendapatan pembudi daya ikan meningkat, namun Nilai Tukar Pembudi Daya Ikan (NTPI) masih fluktuatif dan belum optimal. Hal ini terutama dipengaruhi oleh tingginya biaya pakan dan input produksi serta lemahnya posisi tawar pembudi daya dalam rantai pasok. Di sisi lain, kontribusi ekonomi sektor perikanan budi daya tercermin dari peningkatan signifikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), terutama dari unit pelaksana teknis berstatus BLU dan kegiatan modelling budi daya.

Pembangunan perikanan budi daya diperkuat melalui berbagai program strategis, antara lain pengembangan kampung perikanan budi daya, budi daya

berbasis kawasan (udang, rumput laut, nila salin), gerakan pakan mandiri, penguatan korporasi pembudi daya ikan, serta peningkatan mutu dan keamanan produk. Tata kelola pemerintahan di lingkungan DJPB juga menunjukkan perbaikan yang konsisten.

Ke depan, Renstra DJPB 2025–2029 diarahkan untuk mempercepat peningkatan produktivitas dan nilai tambah perikanan budi daya melalui pendekatan kawasan, efisiensi biaya produksi, penguatan kelembagaan dan SDM pembudi daya, hilirisasi dan perluasan pasar, serta penerapan prinsip ekonomi biru. Dengan arah kebijakan tersebut, perikanan budi daya diharapkan semakin berdaya saing, berkelanjutan, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian nasional serta kesejahteraan pembudi daya.

2.2. Penetapan Kinerja

Dalam mendukung pelaksanaan kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, Direktorat Prasarana dan Sarana telah melakukan beberapa langkah strategis, yaitu:

- a. Penetapan sasaran kegiatan (SK) dan indikator kinerja utama (IKU) Direktorat Prasarana dan Sarana Tahun 2026 sebagai upaya untuk memantapkan arah kebijakan pada Direktorat Prasarana dan Sarana selama 1 (satu) tahun, yang dapat diukur atas tingkat ketercapaian kinerja;
- b. Penetapan Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana Tahun 2026; dan
- c. Penyusunan rencana aksi dan evaluasi rencana aksi setiap triwulannya.

Sebagai penjabaran dari Rencana Kinerja, maka disusun Perjanjian Kinerja yang memuat mengenai Perjanjian Kinerja antara Direktorat Prasarana dan Sarana dengan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya tahun 2026. Adapun Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2. 1. Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana Tahun 2026

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Terkelolanya Sistem Prasarana dan Sarana Perikanan Budi Daya	1	Peralatan/Sarana Perikanan Budi Daya yang disalurkan ke masyarakat (Unit)	502

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
		2	Pengelolaan Saluran Irigasi Perikanan yang disalurkan ke masyarakat (Unit)	30
		3	Unit Produsen Pakan dan Obat Ikan yang dibina (Unit)	20
		4	Kebijakan Tata Kelola Bidang Prasarana dan Sarana Budi Daya yang disusun (Rekomendasi kebijakan)	3
		5	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Perizinan DJPB (Nilai)	80
		6	Jumlah Pakan dan Obat Ikan yang diregistrasi (Produk)	50
2	Terlindunginya Usaha Pembudidayaan Ikan	7	Rekomendasi bidang lahan pembudidayaan ikan yang akan disertifikasi (Orang)	1.000
		8	Pembudidaya skala kecil yang terlindungi usahanya (Orang)	375
3	Meningkatnya Korporasi di Bidang Budi Daya Ikan	9	Jumlah Korporasi Pembudidaya ikan yang dikembangkan (Kelompok masyarakat)	3
4	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Prasarana dan Sarana	10	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Ditjen Perikanan Budi Daya (Persen)	86
		11	Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen Perikanan Budi Daya (Nilai)	84,2
		12	Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Perikanan Budi Daya (Indeks)	81,5
		13	Nilai pengawasan kearsipan internal Ditjen Perikanan Budi Daya (Nilai)	81
		14	Persentase Layanan Perkantoran (Persen)	100
		15	Persentase Penyelesaian Penyusunan SOP (Persen)	100

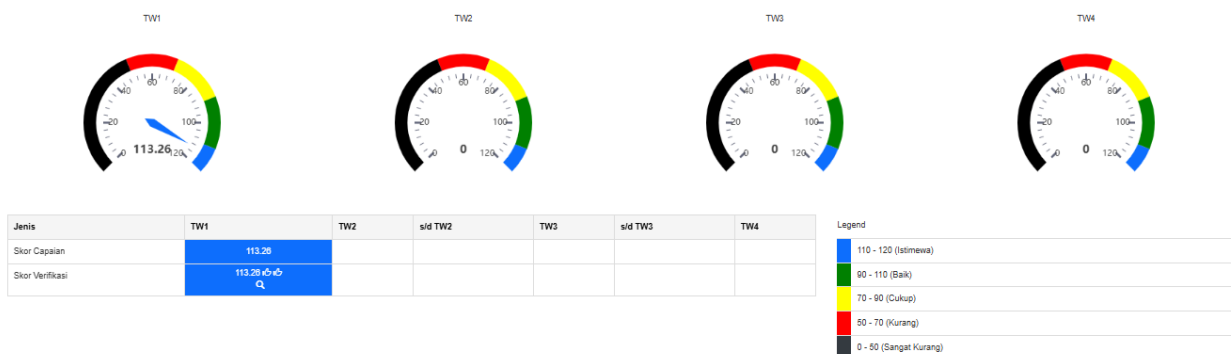
DATA ANGGARAN :

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pengelolaan Sistem Prasarana dan Sarana Perikanan Budi Daya	178.204.341.000
2.	Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Direktorat Prasarana dan Sarana	142.653.000
Total Anggaran Direktorat Prasarana dan Sarana Tahun 2026		178.346.994.000

2.3. Pengukuran Capaian Kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana Tahun 2026

Pengukuran capaian kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana dilakukan dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Prasarana dan Sarana dengan data pencapaian kerjanya. Metode pengukuran kinerja berpedoman pada manual indikator kinerja dan cara pengukuran kinerja dilakukan dari bawah ke atas. Data yang dimasukan sebagai pencapaian kinerja harus diverifikasi oleh Tim Kinerja, sebagai data mutakhir yang diambil dari sumber data yang tepat yakni dari unit kerja pemilik kegiatan. Pengukuran indikator kinerja yang baik adalah dapat memberikan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga data yang disajikan harus: (i) Valid, diukur menggunakan alat ukur yang tepat sesuai dengan manual indikator; (ii) Reliable, meskipun diukur berulang-ulang hasilnya tetap konsisten; dan (iii) Obyektif, bebas dari intervensi/kepentingan.

Hasil pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja Triwulanan yang didukung dengan penerapan Aplikasi "Kinerjaku", capaian NKO Direktorat Prasarana dan Sarana Triwulan I tahun 2026 sebesar 113,26% seperti terlihat dalam gambar 2.4.



Gambar 2. 1. Nilai Capaian Kinerja Trwiulan 1 Tahun 2026

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas capaian organisasi Direktorat Prasarana dan Sarana, yang menjadi indikator utama sebanyak 15 indikator dengan rincian seperti disajikan dalam tabel 3.1.

Tabel 3. 1. Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 Direktorat Prasarana dan Sarana

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	CAPAIAN	%
1	Terkelolanya Sistem Prasarana dan Sarana Perikanan Budi Daya	1	Peralatan/Sarana Perikanan Budi Daya yang disalurkan ke masyarakat (Unit)	502	0	0
		2	Pengelolaan Saluran Irigasi Perikanan yang disalurkan ke masyarakat (Unit)	30	0	0
		3	Unit Produsen Pakan dan Obat Ikan yang dibina (Unit)	20	1	5
		4	Kebijakan Tata Kelola Bidang Prasarana dan Sarana Budi Daya yang disusun (Rekomendasi kebijakan)	3	0	0
		5	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Perizinan DJPB (Nilai)	80	92,26	115
		6	Jumlah Pakan dan Obat Ikan yang diregistrasi (Produk)	50	77	154
2	Terlindunginya Usaha Pembudidayaan Ikan	7	Rekomendasi bidang lahan pembudidayaan ikan yang akan disertifikasi (Orang)	1.000	6.540	654
		8	Pembudidaya skala kecil yang terlindungi usahanya (Orang)	375	12.907	344
3	Meningkatnya Korporasi di Bidang Budi Daya Ikan	9	Jumlah Korporasi Pembudidaya ikan yang dikembangkan (Kelompok masyarakat)	3	0	0
4	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Prasarana dan Sarana	10	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Ditjen Perikanan Budi Daya (Persen)	86	97,46	113
		11	Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen Perikanan Budi Daya (Nilai)	84,2	0	0

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	CAPAIAN	%
		12	Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Perikanan Budi Daya (Indeks)	81,5	0	0
		13	Nilai pengawasan kearsipan internal Ditjen Perikanan Budi Daya (Nilai)	81	0	0
		14	Persentase Layanan Perkantoran (Persen)	100	100	100
		15	Persentase Penyelesaian Penyusunan SOP (Persen)	100	0	0

3.2. Analisis Kinerja

3.2.1. Terkelolanya Sistem Prasarana dan Sarana Perikanan Budi Daya

3.2.1.1. Peralatan/Sarana Perikanan Budi Daya yang disalurkan ke masyarakat

Tabel 3. 2. Peralatan/Sarana Perikanan Budi Daya yang disalurkan ke masyarakat Triwulan I Tahun 2026

Sasaran Kegiatan : Terkelolanya Sistem Prasarana dan Sarana Perikanan Budi Daya								
IKU: Peralatan/Sarana Perikanan Budi Daya yang disalurkan ke masyarakat (unit)								
Realisasi Tahun 2022 -2025				Tahun 2026			Pertumbuhan 2025 -2026	Rata -rata Pertumbuhan 2022 - 2026
2022	2023	2024	2025	Target (Unit)	Realisasi (Unit)	% Capaian		
N/A	N/A	N/A	N/A	502	0	0	N/A	N/A

Perikanan budi daya merupakan salah satu sektor strategis yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan di berbagai daerah, didukung oleh ketersediaan sumber daya alam seperti lahan, air, serta kondisi lingkungan yang sesuai untuk kegiatan budidaya. Potensi tersebut mencakup pengembangan komoditas air tawar, payau, maupun laut yang dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Namun demikian, pemanfaatan potensi perikanan budi daya di daerah belum sepenuhnya optimal. Salah satu kendala utama yang dihadapi oleh pembudidaya ikan adalah keterbatasan akses terhadap peralatan dan sarana budidaya yang memadai sehingga kegiatan budidaya belum berjalan secara efektif dan efisien.

Di sisi lain, masih banyak pembudidaya yang menggunakan peralatan sederhana dengan tingkat teknologi rendah, sehingga belum mampu mendukung pengelolaan usaha secara optimal. Hal ini berdampak pada belum maksimalnya pemanfaatan potensi lahan dan sumber daya yang tersedia, rendahnya produktivitas, serta tingginya risiko kegagalan usaha.

Oleh karena itu, diperlukan intervensi pemerintah melalui program bantuan peralatan dan sarana perikanan budi daya yang disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan spesifik di masing-masing daerah. Penyediaan peralatan seperti bioflok, mesin pembuat pakan ikan, karamba jaring apung (KJA) dan sarana pendukung excavator diharapkan dapat mendorong optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya lokal.

Dengan dukungan peralatan dan sarana, pembudidaya ikan diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha, menerapkan praktik budidaya yang baik, serta menghasilkan produk

yang berkualitas dan berdaya saing. Selain itu, optimalisasi potensi perikanan budi daya di daerah juga akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Dalam rangka memastikan efektivitas, ketepatan sasaran, serta keberlanjutan pemanfaatan bantuan peralatan dan sarana perikanan budi daya, diperlukan persyaratan bagi calon penerima bantuan. Persyaratan ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa bantuan yang diberikan benar-benar dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah.

Pelaksanaan kegiatan bantuan peralatan dan sarana perikanan budi daya ini dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya serta Direktorat Prasarana dan Sarana, yang berperan dalam proses perencanaan, verifikasi calon penerima, penyaluran bantuan, serta monitoring dan evaluasi pemanfaatan bantuan di lapangan. Jumlah bantuan peralatan/sarana perikanan budi daya yang disalurkan ke masyarakat tahun 2026 sebanyak 502 unit yang dapat disalurkan kepada kelompok masyarakat, masyarakat hukum adat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan atau lembaga keagamaan.

Tabel 3. 3. Target dan pelaksana kegiatan peralatan/sarana perikanan budi daya yang disalurkan ke masyarakat tahun 2026

No.	PIC	Jenis Bantuan			
		Bioflok	Mesin Pakan	Excavator	KJA
1	Dit. Prasarana dan Sarana			12	50
2	BPBAP Ujung Bate	16	7		
3	BPBL Batam	11			
4	BPBAT Sungai Gelam	37	9		
5	BBPBL Lampung	25	10		
6	BBPBAT Sukabumi	45	17		
7	BLUPPB Karawang	26			
8	BBPBAP Jepara	46			
9	BPBAP Situbondo	30			
10	BPBL Lombok	28			
11	BPBAT Mandi Angin	35	8		
12	BPBAP Takalar	25	9		
13	BPBAT Tatelu	20	10		
14	BPBL Ambon	26			
	Total	370	70	12	50

3.2.1.2. Pengelolaan Saluran Irigasi Perikanan yang disalurkan ke masyarakat

Pengelolaan Irigasi Tambak Partisipatif (PITAP) adalah kegiatan berbasis peran serta kelompok masyarakat mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan rehabilitasi, dan operasional pemeliharaan jaringan irigasi tambak. Target indikator Pengelolaan Saluran Irigasi Perikanan yang disalurkan ke masyarakat sebesar 30 unit.

Cara penghitungan capaian indikator tersebut berdasarkan jumlah bagian jaringan irigasi tambak yang telah direhabilitasi oleh masyarakat. dengan sumber data yang berasal dari Tim Kerja Sumber Daya Air Direktorat Prasarana dan Sarana.

Tabel 3. 4. Pengelolaan Saluran Irigasi Perikanan yang disalurkan ke masyarakat Triwulan I Tahun 2026

Sasaran Kegiatan : Terkelolanya Sistem Prasarana dan Sarana Perikanan Budi Daya								
IKU: Pengelolaan Saluran Irigasi Perikanan yang disalurkan ke masyarakat (unit)								
Realisasi Tahun 2022 -2025				Tahun 2026			Pertumbuhan 2025 -2026	Rata -rata Pertumbuhan 2022 - 2026
2022	2023	2024	2025	Target (Unit)	Realisasi (Unit)	% Capaian		
N/A	N/A	N/A	N/A	30	0	0	N/A	N/A

Pada triwulan I, sebagai tahap awal pelaksanaan telah dilaksanakan beberapa kegiatan, yaitu:

- 1) Melaksanakan penyusunan dan pembahasan revisi Surat Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya Nomor 405 Tahun 2025 tanggal 6 Oktober 2025 tentang Petunjuk Teknis kegiatan Pengelolaan Irigasi Tambak Partisipatif (PITAP) Tahun Anggaran 2026. Adapun perubahan tersebut tertuang pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya Nomor 11 Tahun 2026 tanggal 6 Oktober 2025 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Kegiatan Pengelolaan Irigasi Tambak Partisipatif (PITAP) Tahun Anggaran 2026.
- 2) Melaksanakan penyusunan dan pembahasan mengenai usulan lokasi kegiatan PITAP yang akan dilaksanakan pada 7 (tujuh) Kabupaten di 5 (lima) Provinsi, meliputi :

Tabel 3. 5. Calon Lokasi PITAP Tahun 2026

No.	Provinsi	No.	Kabupaten
1	Lampung	1	Lampung Timur
2	Banten	2	Serang
3	Jawa Barat	3	Cirebon
4	Jawa Tengah	4	Brebes
		5	Kendal
		6	Pati
5	Jawa Timur	7	Gresik

Kabupaten Lokasi kegiatan PITAP tersebut berdasarkan RTRW yang peruntukannya untuk kegiatan perikanan.

- 3) Rapat pembahasan terkait pengadaan Jasa Konsultan Teknis dan Tenaga Pendamping PITAP (TPPt) Bersama Inspektorat III dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Dari hasil pembahasan tersebut disimpulkan bahwa :

- a. Seluruh dokumen pengadaan perlu dimintakan reviu kepada Inspektorat Jenderal dengan diajukan secara paralel;
- b. Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) perlu didukung dengan rujukan yang jelas, terutama terkait metode perhitungan biaya personal;
- c. Nota dinas dapat ditujukan kepada Kepala Biro PBJ terkait rencana pengadaan.

- 4) Melaksanakan kegiatan Sosialisasi, Identifikasi dan Verifikasi Calon Penerima Calon Lokasi di Kabupaten Cirebon, Serang dan Pati dengan hasil sebagai berikut:

- a. Kabupaten Cirebon

Sosialisasi, Identifikasi dan Verifikasi Calon Penerima Calon Lokasi di Kabupaten Cirebon dilakukan pada kelompok yang diusulkan oleh Dinas Perikanan Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Cirebon yang berada di Kecamatan Gunungjati (Poklina Kalijaka) dan Kecamatan Suranenggala (Poklina Sekar Muara Cai). Identifikasi PITAP di Kecamatan Gunungjati dilakukan di Desa Mertajati pada terusan bagian jaringan irigasi yang sudah dilakukan kegiatan PITAP di tahun 2024 dan jaringan irigasi yang berbeda di Desa Klayan. Terdapat $\pm$ 700 m masing-masing bagian jaringan irigasi yang diusulkan di Desa Klayan dan Desa Jatimerta. Identifikasi PITAP di Kecamatan Suranenggala dilakukan di Desa Muara dengan pengusul kelompok yang baru akan dibentuk tahun ini. Kendala yang ditemukan pada bagian jaringan irigasi yang diusulkan di Desa Klayan, terdapat tempat pembesaran ayam broiler di mana limbah yang dihasilkan oleh tempat pembesaran ayam broiler tersebut dibuang di saluran yang diusulkan oleh Kelompok. Harus dilakukan

sosialisasi dan tindak lanjut bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan Perangkat Desa Klayan. Selain itu, direncanakan adanya restrukturasi POKLINA Kalijaka, Kecamatan Gunungjati pada susunan pengurus dan anggota.



Gambar 3. 1. Calon Lokasi PITAP Desa Klayan, Kec. Gunungjati



Gambar 3. 2. Calon Lokasi PITAP Desa Muara, Kec. Suranenggala

b. Kabupaten Serang

Sosialisasi, Identifikasi dan Verifikasi Calon Penerima Calon Lokasi di Kabupaten Serang dilakukan pada kelompok yang diusulkan oleh Dinas Perikanan Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Serang yang berada di Kecamatan Pontang (Poklina Linduk Maju Bersama) dan Kecamatan Tanara (Poklina Muara Bakau). Identifikasi PITAP di Kecamatan Pontang dilakukan di Desa Linduk dan Desa Sukajaya. Identifikasi PITAP di Kecamatan Tanara dilakukan di Desa Tenjoayu. Lokasi bagian jaringan irigasi yang diusulkan di Kecamatan Pontang memiliki lebar antara 3-6 m dengan panjang ± 3.000 m. Luas tambak yang terairi dari jaringan irigasi tersebut yaitu ± 100 ha dengan komoditas pembudidayaan yaitu Bandeng dan Udang dengan permasalahan yang terdapat di bagian jaringan irigasi Kec. Pontang, yaitu pendangkalan yang memicu banjir ketika hujan deras dan pasang dari laut, sehingga diharapkan dengan adanya kegiatan PITAP permasalahan banjir di lokasi usulan dapat teratasi. Lokasi bagian jaringan irigasi yang diusulkan di Kecamatan Tanara memiliki lebar antara 1-2 m dengan panjang ± 3.000 m. Bagian jaringan irigasi yang sudah dilakukan kegiatan PITAP pada tahun

2023 yaitu sepanjang 1.200 m dengan sisa yang ada akan diusulkan di tahun 2026. Permasalahan yang terdapat di bagian jaringan irigasi tersebut, yaitu pendangkalan dan sumbatan saluran akibat pendangkalan. Akibat permasalahan tersebut, ketika musim kemarau/kering, tingkat salinitas di tambak terlampaui tinggi dan susah untuk dinetralkan (dikurangi tingkat salinitasnya). Diharapkan dengan adanya kegiatan PITAP di Kecamatan Tanara, permasalahan tingginya tingkat salinitas di musim kemarau/kering bisa teratasi.



Gambar 3. 3. Calon Lokasi PITAP Desa Linduk, Kec. Pontang



Gambar 3. 4. Calon Lokasi PITAP Desa Terpayuk, Kec. Tanara

3.2.1.3. Unit Produsen Pakan dan Obat Ikan yang dibina

Pembinaan CPPIB adalah pembinaan Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik yang dilakukan terhadap seluruh unit usaha produksi/produsen pakan di dalam negeri. Pembinaan yang dimaksud dilakukan terhadap 17 prinsip-prinsip CPPIB sesuai SNI 8227 tentang Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik. Pembinaan dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti: sosialisasi, bimbingan teknis maupun pemeriksaan lapang dengan mengacu ketentuan prinsip-prinsip CPPIB.

Pembinaan CPOIB adalah pembinaan Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik yang dilakukan terhadap seluruh unit usaha produksi/produsen obat Prasarana dan Sarana di dalam negeri. Pembinaan yang dimaksud dilakukan terhadap 11 prinsip-prinsip CPOIB sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor: 187 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Sertifikasi Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik. Pembinaan dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti: sosialisasi, bimbingan teknis maupun pemeriksaan lapang dengan mengacu ketentuan prinsip-prinsip CPOIB.

Pembinaan CDOIB adalah pembinaan Cara Distribusi Obat Ikan Yang Baik yang dilakukan terhadap seluruh unit usaha

produksi/produsen obat di dalam negeri. Pembinaan yang dimaksud dilakukan terhadap 7 prinsip-prinsip CDOIB sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor: 186 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Cara Distribusi Obat Ikan Yang Baik. Pembinaan dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti: sosialisasi, bimbingan teknis maupun pemeriksaan lapang dengan mengacu ketentuan prinsip-prinsip CDOIB.

Direktorat Prasarana dan Sarana sebagai Direktorat yang melakukan kegiatan Pembinaan CPPIB, CPOIB dan CDOIB terus berupaya melakukan berbagai pembinaan di daerah – daerah agar para Pelaku Usaha Pembuatan Pakan, Pembuatan Obat dan Distributor Obat dapat mencapai standar yang telah ditetapkan oleh Ditjen Perikanan Budi Daya, sehingga keamanan pangan dari hasil budi daya di Indonesia dapat terjamin mutu dan kualitasnya.

Berdasarkan data, capaian unit produsen pakan dan obat yang dibina penerapan CPPIB, CPOIB dan CDOIB s/d TW I Tahun 2026 ada sebanyak 1 produsen atau mencapai sebesar 5% dari target Tahun 2026 sebanyak 20 produsen. Dilihat dari target per Triwulan, pada Triwulan I target yaitu 1 produsen sehingga untuk TW I target Unit Produsen Pakan dan Obat Ikan yang dibina mencapai 100%.

Tabel 3. 6. Unit Produsen Pakan dan Obat Ikan yang dibina Triwulan I Tahun 2026

Sasaran Kegiatan : Terkelolanya Sistem Prasarana dan Sarana Perikanan Budi Daya								
IKU: Unit Produsen Pakan dan Obat Ikan yang dibina (unit)								
Realisasi Tahun 2022 -2025				Tahun 2026			Pertumbuhan 2025 -2026	Rata -rata Pertumbuhan 2022 - 2026
2022	2023	2024	2025	Target (Unit)	Realisasi (Unit)	% Capaian		
N/A	N/A	N/A	N/A	20	1	5	N/A	N/A

3.2.1.4. Kebijakan Tata Kelola Bidang Prasarana dan Sarana Budi Daya yang disusun

Kebijakan tata kelola bidang prasarana dan sarana budi daya ikan, mencakup berbagai aspek. Ini termasuk penyediaan dan pengelolaan infrastruktur seperti kolam, tambak, dan wadah budidaya lainnya, serta penyediaan sarana produksi seperti benih, pakan, dan alat-alat pendukung budidaya. Selain itu, kebijakan juga mengatur standar kualitas air, sanitasi, dan kesehatan ikan, serta aspek pengelolaan lingkungan dalam kegiatan budidaya. Kebijakan tata kelola ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi budidaya ikan, meningkatkan kesejahteraan pembudidaya ikan, menjamin keberlanjutan usaha budidaya ikan dan kelestarian lingkungan, serta menjamin ketersediaan ikan yang berkualitas untuk memenuhi

kebutuhan pangan.

Untuk tahun 2026 ini, Direktorat Prasarana dan Sarana menyusun beberapa dokumen terkait kebijakan tata kelola bidang prasarana dan sarana budi daya ikan, yaitu :

- a. Rancangan Peraturan Menteri KP tentang Tata Kelola Pemanfaatan Air dan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan;
- b. Buku Profil Usaha dan Investasi Perikanan Budi Daya;
- c. Revisi Permen KP Nomor 19 Tahun 2024 tentang Obat Ikan.

Tabel 3. 7. Kebijakan Tata Kelola Bidang Prasarana dan Sarana Budi Daya yang disusun Triwulan I Tahun 2026

Sasaran Kegiatan : Terkelolanya Sistem Prasarana dan Sarana Perikanan Budi Daya								
IKU: Kebijakan Tata Kelola Bidang Prasarana dan Sarana Budi Daya yang disusun (Rekomendasi kebijakan)								
Realisasi Tahun 2022 -2025				Tahun 2026			Pertumbuhan 2025 -2026	Rata -rata Pertumbuhan 2022 - 2026
2022	2023	2024	2025	Target (Rekomendasi Kebijakan)	Realisasi (Rekomendasi Kebijakan)	% Capaian		
N/A	N/A	N/A	N/A	3	0	0	N/A	N/A

3.2.1.5. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Perizinan DJPB

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Untuk mendapatkan IKM ini, dilakukan dengan metode survei.

Survei IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas publik selanjutnya. Survei IKM ini diukur berdasarkan kuesioner yang telah diisi pengguna layanan terhadap 9 unsur pelayanan yang didasarkan Peraturan Menpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perizinan DJPB pada triwulan I senilai 92,26 sehingga telah memenuhi target senilai 80. Hasil ini didapatkan dari hasil penilaian terhadap 9 (sembilan) unsur sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 14/PERMEN-PANRB/2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, yaitu: persyaratan pelayanan, sistem, mekanisme, prosedur pelayanan, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk

spesifikasi pelayanan, kompetensi personil, sikap petugas, penanganan pengaduan, saran dan masukan serta fasilitas pelayanan. Metode pengumpulan data dalam rangka penilaian indeks ini dilakukan dengan cara membagikan kuisioner kepada seluruh pelaku usaha (*stakeholder*) Perizinan Berusaha di Ditjen Perikanan Budi Daya yang melakukan konsultasi dan/atau memanfaatkan layanan pendaftaran pakan ikan. Triwulan II akan tetap dilakukan pelaksanaan konsultasi publik sesuai dengan standar pelayanan dengan mengundang pelaku usaha. Selain itu juga sudah terdapat Whatsapp Center untuk memudahkan pelaku usaha berkomunikasi dengan layanan perizinan DJPB.

Tabel 3. 8. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Perizinan DJPB
Triwulan I Tahun 2026

Sasaran Kegiatan : Terkelolanya Sistem Prasarana dan Sarana Perikanan Budi Daya								
IKU: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Perizina DJPB (nilai)								
Realisasi Tahun 2022 -2025				Tahun 2026			Pertumbuhan 2025 -2026	Rata -rata Pertumbuhan 2022 - 2026
2022	2023	2024	2025	Target (Nilai)	Realisasi (Nilai)	% Capaian		
N/A	N/A	N/A	N/A	80	92,26	115	N/A	N/A

3.2.1.6. Jumlah Pakan dan Obat Ikan yang diregistrasi

Pakan ikan adalah segala jenis bahan makanan, baik alami maupun olahan, yang diberikan kepada ikan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi, pertumbuhan, dan kelangsungan hidupnya. Pakan ikan dapat berupa pakan alami seperti plankton, atau pakan buatan yang dibuat dari berbagai bahan baku.

Obat ikan adalah sediaan yang digunakan untuk mengobati ikan, menghilangkan gejala penyakit, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh ikan. Obat ikan dapat berupa bahan kimia atau bahan alami yang dirancang untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan pada ikan, baik ikan hias maupun ikan konsumsi.

Registrasi Pakan dan Obat Ikan dilakukan pelaku usaha pakan dan obat yang akan mengedarkan produknya di Indonesia. Produk pakan dan obat dari perusahaan yang telah lolos hasil uji laboratorium dan melengkapi syarat administrasi dan lolos tahap pembahasan oleh tim penilai, kemudian pelaku usaha tersebut mendapatkan sertifikat pendaftaran pakan dan/atau obat ikan yang dikeluarkan melalui sistem OSS.

Capaian Registrasi Pakan dan Obat Ikan sebanyak 77 dari target sebanyak 12 produk, sehingga telah mencapai target. Triwulan selanjutnya akan tetap dilakukan registrasi produk pakan dan obat yang melakukan permohonan kepada Direktorat Prasarana dan Sarana.

Tabel 3. 9. Jumlah Pakan dan Obat Ikan yang diregistrasi Triwulan I Tahun 2026

Sasaran Kegiatan : Terkelolanya Sistem Prasarana dan Sarana Perikanan Budi Daya								
IKU: Jumlah Pakan dan Obat Ikan yang diregistrasi (produk)								
Realisasi Tahun 2022 -2025				Tahun 2026			Pertumbuhan 2025 -2026	Rata -rata Pertumbuhan 2022 - 2026
2022	2023	2024	2025	Target (Produk)	Realisasi (Produk)	% Capaian		
N/A	N/A	N/A	N/A	50	77	154	N/A	N/A

3.2.2. Terlindunginya Usaha Pembudidayaan Ikan

3.2.2.1. Rekomendasi bidang lahan pembudidayaan ikan yang akan disertifikasi

Tabel 3. 10. Rekomendasi bidang lahan pembudidayaan ikan yang akan disertifikasi Triwulan I Tahun 2026

Sasaran Kegiatan : Terlindungi Usaha Pembudidayaan Ikan								
IKU: Rekomendasi Bidang Lahan Pembudidayaan Ikan yang akan Disertifikasi (Orang)								
Realisasi Tahun 2022 -2025				Tahun 2026			Pertumbuhan 2025 -2026	Rata -rata Pertumbuhan 2022 - 2026
2022	2023	2024	2025	Target (Orang)	Realisasi (Orang)	% Capaian		
N/A	N/A	N/A	N/A	1.000	6.540	654	N/A	N/A

Pemberdayaan hak atas tanah masyarakat bagi pembudi daya ikan adalah kegiatan dalam rangka penyediaan subjek dan objek (pra sertifikasi), sertifikasi, dan pengaksesan aset ke sumber-sumber ekonomi, produksi dan pasar (pasca sertifikasi) yang dilakukan lintas sektoral secara terintegrasi dan berkesinambungan. Penyiapan sertifikasi hak atas tanah Pembudi daya ikan atau Pra SeHATkan dilakukan melalui koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan selanjutnya diusulkan kepada BPN untuk mengikuti kegiatan Sertifikasi. Hasil yang diharapkan dari kegiatan Pra SeHATkan adalah untuk menyiapkan lahan pembudi daya ikan yang memenuhi persyaratan sesuai kriteria sehingga dapat diproses penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanahnya untuk mendapatkan legalitas hak atas tanah yang dimiliki. Manfaatnya adalah sertipikat yang diperoleh sebagai tanda pengakuan kepemilikan lahan yang dapat digunakan sebagai agunan kredit pada perbankan dan

sumber pembiayaan lainnya untuk kegiatan usaha pembudidayaan ikan.

Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk dapat mencapai target usulan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan di antaranya yaitu pemberitahuan kepada dinas provinsi/kabupaten/kota yang menangani perikanan untuk segera mengusulkan bidang lahan yang akan dimasukkan dalam program ini. Selain itu, dilakukan juga kegiatan sosialisasi, koordinasi, dan evaluasi terhadap usulan yang disampaikan dinas tersebut. Hasil dari proses tersebut yaitu terpenuhinya capaian usulan kegiatan Pra sehatkan tahun 2026 pada Triwulan 1 dengan target sebanyak 1.000 orang, sedangkan usulan yang masuk melampaui target tersebut yaitu sejumlah 6.757 bidang dan 6.540 orang yang berasal dari 17 Provinsi dan 61 Kabupaten/Kota.

Tabel 3. 11. Target Usulan Program SEHAT Tahun 2027

No	Provinsi	No	Kabupaten	Usulan Jumlah (Bidang)	Usulan Jumlah (Orang)
1	Sumatera Utara	1	Deli Serdang	5	4
		2	Kota Sibolga	2	2
2	Bengkulu	3	Rejang Lobong	9	9
3	Riau	4	Rokan Hilir	15	15
		5	Kepulauan Meranti	33	33
4	Lampung	6	Way Kanan	5	5
5	Banten	7	Kota Tangerang	4	3
6	Jawa Barat	8	Kuningan	250	250
		9	Kota Bogor	3	3
		10	Indramayu	600	600
		11	Sukabumi	200	200
		12	Bandung Barat	399	399
7	Jawa Tengah	13	Cilacap	74	74
		14	Kendal	60	55
		15	Pati	306	306
		16	Batang	2	2
		17	Sragen	12	12
		18	Boyolali	1	1
		19	Magelang	6	3
		20	Pekalongan	107	107
		21	Kebumen	50	50
		22	Jepara	2	2
8	Jawa Timur	23	Banyuwangi	100	100
		24	Nganjuk	4	2
		25	Tulungagung	50	36
		26	Situbondo	29	28
		27	Kota Batu	4	4
		28	Kota Blitar	2	2
		29	Malang	800	800
		30	Bondowoso	2	2
9	Kalimantan Barat	31	Landak	81	81

No	Provinsi	No	Kabupaten	Usulan Jumlah (Bidang)	Usulan Jumlah (Orang)
		32	Melawi	10	10
		33	Singkawang	11	11
		34	Bengkayang	147	135
10	Kalimantan Utara	35	Nunukan	80	41
		36	Tanah Tidung	64	37
		37	Bulungan	148	127
11	Kalimantan Timur	38	Penajam Paser Utara	20	20
12	Nusa Tenggara Barat	39	Lombok Tengah	564	544
		40	Lombok Timur	463	463
13	Sulawesi Barat	41	Polewali Mandar	7	7
		42	Mamasa	35	18
		43	Mamuju Tengah	34	34
14	Sulawesi Selatan	44	Luwu Timur	200	200
		45	Wajo	132	132
		46	Toraja Utara	30	25
		47	Pinrang	399	356
		48	Luwu Utara	200	200
		49	Luwu	190	190
		50	Takalar	100	100
		51	Sinjai	100	100
		52	Bone	127	127
15	Sulawesi Tengah	53	Morowali Utara	258	258
		54	Morowali	76	76
		55	Parigi Moutong	21	20
		56	Banggai	32	27
16	Sulawesi Tenggara	57	Konawe	3	3
		58	Konawe Selatan	29	29
		59	Kolaka	43	43
		60	Bombana	10	10
17	Sulawesi Utara	61	Tomohon	7	7
Jumlah				6.757	6.540

3.2.2.2. Pembudidaya skala kecil yang terlindungi usahanya

Tabel 3. 12. Pembudidaya skala kecil yang terlindungi usahanya Triwulan I Tahun 2026

Sasaran Kegiatan : Terlindungi Usaha Pembudidayaan Ikan								
IKU: Pembudidaya Skala Kecil yang Terlindungi Usahanya (Orang)								
Realisasi Tahun 2022 -2025				Tahun 2026			Pertumbuhan 2025 -2026	Rata -rata Pertumbuhan 2022 - 2026
2022	2023	2024	2025	Target (Orang)	Realisasi (Orang)	% Capaian		
N/A	N/A	N/A	N/A	375	12.907	3.441	N/A	N/A

Pupuk merupakan salah satu kebutuhan sarana produksi penting dalam mendukung peningkatan produksi, produktivitas, mutu, dan daya saing produk perikanan budi daya. Pupuk yang digunakan dalam budi daya ikan adalah bahan kimia anorganik dan/atau organik, bahan alami dan/atau sintetis, organisme dan/atau yang telah melalui proses rekayasa, untuk menumbuhkan pakan alami sebagai sumber makanan utama bagi ikan. Sebagai upaya mendukung upaya pencapaian sasaran produksi perikanan budi daya yang terus meningkat, pemerintah memfasilitasi prasarana dan sarana salah satunya melalui subsidi pupuk untuk perikanan budi daya.

Kebijakan subsidi pupuk sebagai program pemerintah dimaksudkan membantu pembudi daya ikan untuk pengadaan dan penggunaan pupuk dalam usahanya agar dapat menerapkan pemupukan berimbang, sesuai kondisi spesifik lokasi, sehingga memperoleh hasil budi daya yang optimal. Pupuk bersubsidi merupakan pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan pembudi daya ikan yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah di sektor perikanan yang dalam pelaksanaannya diatur berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Capaian kegiatan Pembudidaya Skala Kecil Yang Terlindungi Usahanya Tahun 2026 adalah target sebanyak 375 orang, adapun pada Triwulan I Tahun 2026 telah terealisasi untuk penebusan pupuk sebanyak 12.907 orang yang berasal dari 3 provinsi yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah dan Sulawesi Barat.

Tabel 3. 13. Data Penebusan Pupuk Bersubsidi Triwulan I Tahun 2026

Provinsi	Kabupaten/Kota	Jumlah (Orang)
Jawa Timur	Gresik	7.293
	Lamongan	4.922
Jawa Tengah	Brebes	3
	Jepara	47
	Pati	603
	Pemalang	2
Sulawesi Barat	Mamuju	37

3.2.3. Meningkatnya Korporasi di Bidang Budi Daya Ikan

3.2.3.1. Jumlah Korporasi Pembudidaya ikan yang dikembangkan

Tabel 3. 14. Jumlah Korporasi Pembudidaya Ikan yang Dikembangkan Triwulan I Tahun 2026

Sasaran Kegiatan : Terlindungi Usaha Pembudidayaan Ikan								
IKU: Jumlah Korporasi Pembudidaya Ikan yang Dikembangkan (Kelompok Masyarakat)								
Realisasi Tahun 2022 -2025				Tahun 2026			Pertumbuhan 2025 -2026	Rata -rata Pertumbuhan 2022 - 2026
2022	2023	2024	2025	Target (Kelompok Masyarakat)	Realisasi (Kelompok Masyarakat)	% Capaian		
N/A	N/A	N/A	N/A	3	0	0	N/A	N/A

Peningkatan usaha petani dan nelayan termasuk Pembudi Daya Ikan dilakukan dengan cara mendorong terjadinya peningkatan skala ekonomi kecil untuk bergabung dan berkolaborasi melalui kelompok atau korporasi besar. Dengan demikian, diharapkan akan berdampak terhadap peningkatan skala ekonomi yang besar pula. Bentuk peningkatan usaha petani dan nelayan tersebut melalui Korporasi. Korporasi Pembudi Daya Ikan oleh karenanya dapat diartikan sebagai suatu kegiatan usaha (agribisnis) yang meliputi usaha hulu hingga hilir yang dijalankan bersama oleh pembudi daya ikan dalam bentuk usaha ekonomi yang berbadan hukum dimana sebagian besar kepemilikan modal dimiliki Pembudi Daya Ikan.

Peningkatan kapasitas kelompok pembudidaya ikan sebagai implementasi kegiatan korporasi pada periode Triwulan 1 tahun 2026 ini memasuki tahapan pengumpulan data yang kegiatannya dielaborasi dengan kegiatan lain di antaranya kegiatan budidaya ikan tematik bioflok dan minapadi. Melalui kegiatan tematik bioflok dan minapadi tersebut diharapkan dapat diperoleh daftar nominatif kelompok pembudidaya ikan yang dapat ditingkatkan menuju level korporasi. Daftar nominatif ini diharapkan dapat diproses lebih lanjut untuk capaian kegiatan korporasi pada tri wulan berikutnya.

3.2.4. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Direktorat Prasarana dan Sarana

3.2.4.1. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Ditjen Perikanan Budi Daya

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan telah digunakan secara efektif dan efisien mungkin guna mencapai tujuan. Target yang ditetapkan tahun 2026 untuk indikator kegiatan ini adalah 86 (persen), dengan capaian pada TW I Tahun 2026 sebesar 97,46%

Tabel 3. 15. Capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Ditjen Perikanan Budi Daya Triwulan I Tahun 2026

Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Prasarana dan Sarana								
IKU : Persentase Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Ditjen Perikanan Budi Daya								
Realisasi Tahun 2022 -2025				Tahun 2026			Pertumbuhan 2025 -2026	Rata -rata Pertumbuhan 2021 - 2025
2022	2023	2024	2025	Target (Persen)	Realisasi (Persen)	% Capaian		
N/A	N/A	N/A	N/A	86	97,46	113	N/A	N/A

Untuk mendukung pencapaian Indikator ini, kegiatan yang dilakukan pada Tahun 2026 yaitu telah dilaksanakan penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal secara bertahap.

Sedangkan permasalahan yang dihadapi pada Tahun 2026 yaitu beberapa dokumen penyelesaian tindak lanjut baru dapat diselesaikan ketika sudah memasuki triwulan berikutnya sehingga data yang sudah diunggah tidak dapat meningkatkan capaian yang ada.

Rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun selanjutnya yaitu Melakukan follow up secara berkala atas data yang sebelumnya telah diminta dan melakukan penyelesaian tidak hanya pada akhir triwulan melainkan di sepanjang triwulan.

3.2.4.2. Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen Perikanan Budi Daya

SAKIP merupakan instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja (Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang SAKIP).

Nilai PM SAKIP Satker Direktorat Prasarana dan Sarana merupakan indikator kinerja baru yang targetnya bersifat tahunan dan pencapaiannya dihitung di akhir tahun berdasarkan hasil penilaian Inspektorat Jenderal dengan mekanisme berdasarkan pada Permen PAN RB. Target yang ditetapkan tahun 2026 untuk indikator kegiatan ini adalah 84,2 (nilai).

Tabel 3. 16. Capaian Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen Perikanan Budi Daya
Triwulan I Tahun 2026

Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Prasarana dan Sarana								
IKU : Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen Perikanan Budi Daya (Nilai)								
Realisasi Tahun 2022 -2025				Tahun 2026			Pertumbuhan 2025 -2026	Rata -rata Pertumbuhan 2021 - 2025
2022	2023	2024	2025	Target (Nilai)	Realisasi (Nilai)	% Capaian		
N/A	N/A	N/A	N/A	84,2	0	0	N/A	N/A

Adapun Rencana aksi pada tahun 2026, Direktorat Prasarana dan Sarana akan memaksimalkan sumberdaya yang ada untuk dapat memenuhi nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Prasarana dan Sarana.

3.2.4.3. Indeks Profesionalitas ASN Satker Direktorat Prasarana dan Sarana

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Nilai Indeks Profesionalitas ASN Unit Organisasi Level II merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN Unit Organisasi Level II yang diukur setiap tahun oleh Biro SDM Aparatur dan Organisasi, Sekretariat Jenderal merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN Unit Organisasi Level II yang diukur setiap tahun oleh Biro SDM Aparatur dan Organisasi, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Peraturan

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, terdapat beberapa penyesuaian pada pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, yaitu :

a. Dimensi Kualifikasi

Dimensi kualifikasi memperhitungkan persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan sehingga pengukuran bobot dimensi kualifikasi berubah menjadi :

Tabel 3. 17. Persyaratan Kualifikasi Jabatan

Dimensi	Jabatan	Jenis Jabatan	Persyaratan Pendidikan Minimal Diangkat Kedalam Jabatan	Pendidikan yang Diperoleh Pegawai (Bobot Nilai)					
				S3	S2	SI / DIV	DIII	DII / DI / SLTA / Sederajat	Di Bawah SLTA
Kualifikasi	Manajerial	Jabatan Pimpinan Tinggi	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Administrator	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Pengawas	DIII	25	25	25	20	10	10
	Nonmanajerial	Jabatan Fungsional (Kategori Keterampilan)	SLTA	25	25	25	25	20	10
			DIII	25	25	25	20	10	10
		Jabatan Fungsional (Kategori Keahlian)	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
			S2	25	20	10	10	10	10
		Jabatan Pelaksana	SLTA	25	25	25	25	20	10

b. Indikator dimensi kompetensi yang digunakan terdiri atas bobot dasar yang diperoleh dari konversi hasil penilaian kinerja dan riwayat pengembangan kompetensi melalui jalur pelatihan klasikal dan nonklasikal, sehingga pengukuran dimensi kompetensi berubah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3. 18. Tabel Indikator Dimensi Kompetensi

No	Instrumen Perhitungan	Jabatan Manajerial			Jabatan Nonmanajerial	
		Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Fungsional	Jabatan Pelaksana
1.	Hasil Penilaian Kinerja					
	- Sangat Baik	25	25	25	25	25
	- Baik	20	20	20	20	20
	- Butuh Perbaikan	15	15	15	15	15
	- Kurang / <i>Misconduct</i>	10	10	10	10	10
	- Sangat Kurang	5	5	5	5	5
2.	Diklat Kepemimpinan					
	- Sudah	10	10	10	-	-
	- Belum	0	0	0	-	-
3.	Diklat Fungsional					
	- Sudah	-	-	-	10	-
	- Belum	-	-	-	0	-
4.	Diklat Teknis					
	- Sudah	-	-	-	-	10
	- Belum	-	-	-	-	0
5.	Pengembangan Kompetensi 20 JP Setahun					
	PNS					
	>= 20 JP	5	5	5	5	5
	<20 JP	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional
	PPPK					
	>= 24 JP	5	5	5	5	5
	<24 JP	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional

Target IP ASN pada tahun 2026 adalah 81,5 (indeks). Pada Triwulan I tahun 2026, belum dapat dilakukan pengukuran, karena pengukuran indikator kinerja IP ASN ini dilakukan setiap semester.

Tabel 3. 19. Capaian Indeks Profesionalitas ASN Satker Direktorat Prasarana dan Sarana

Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Prasarana dan Sarana								
IKU : Indeks Profesionalitas ASN Satker Direktorat Prasarana dan Sarana (Indeks)								
Realisasi Tahun 2022 -2025				Tahun 2025			Pertumbuhan 2025 -2026	Rata -rata Pertumbuhan 2025 - 2026
2022	2023	2024	2025	Target (Indeks)	Realisasi (Indeks)	% Capaian		
N/A	N/A	N/A	N/A	81,5	0	0	N/A	N/A

Untuk mendukung pencapaian indikator IP ASN, maka pada bulan Januari 2026 telah dilaksanakan penilaian kinerja pegawai untuk periode Triwulan IV tahun 2025, dan periode Final tahun 2026, dan untuk meningkatkan kompetensi ASN di lingkungan Direktorat Prasarana dan Sarana, maka di sampaikan kepada seluruh ASN di lingkungan Direktorat Prasarana dan Sarana untuk mengikuti Pelatihan dan Diklat.

3.2.4.4. Nilai pengawasan kearsipan internal Ditjen Perikanan Budi Daya

Pengawasan Kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan. Audit Kearsipan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar kearsipan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan penyelenggaraan kearsipan.

Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Target yang ditetapkan tahun 2026 untuk indikator kegiatan ini adalah 81 (persen), dengan capaian pada TW IV Tahun 2026

Tabel 3. 20. Capaian Nilai pengawasan kearsipan internal Ditjen Perikanan Budi Daya

Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Prasarana dan Sarana								
IKU : Nilai pengawasan kearsipan internal Ditjen Perikanan Budi Daya (Nilai)								
Realisasi Tahun 2022 -2025				Tahun 2025			Pertumbuhan 2025 -2026	Rata -rata Pertumbuhan 2025 - 2026
2022	2023	2024	2025	Target (Nilai)	Realisasi (Nilai)	% Capaian		
N/A	N/A	N/A	N/A	81	0	0	N/A	N/A

Untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja ini, kegiatan yang dilakukan pada Tahun 2026 yaitu Pelaksanaan penilaian pengawasan kearsipan internal lingkup KKP dan DJPB. Adapun kendala yang dihadapi yaitu di bidang SDM belum adanya Arsiparis di lingkup Direktorat Prasarana dan Sarana. Sedangkan rencana aksi yang akan dilakukan pada TW selanjutnya melakukan pemberkasan melalui Portal.

3.2.4.5. Persentase Layanan Perkantoran

Tabel 3. 21. Persentase Layanan Perkantoran Triwulan I Tahun 2026

Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Prasarana dan Sarana								
IKU : Persentase Layanan Perkantoran (Persen)								
Realisasi Tahun 2022 -2026				Tahun 2026			Pertumbuhan 2025 -2026	Rata -rata Pertumbuhan 2022 - 2026
2022	2023	2024	2026	Target (Persen)	Realisasi (Persen)	% Capaian		
N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	100	N/A	N/A

Layanan perkantoran adalah semua bentuk pelayanan yang mendukung kegiatan administrasi dan operasional kantor, seperti pengelolaan dokumen, komunikasi, hingga pelayanan tamu. Layanan Perkantoran adalah merupakan kegiatan layanan yang lebih bersifat pada pelayanan internal layanan jamuan rapat, layanan daya dan jasa. Kegiatan administrasi terkait dengan kegiatan surat menyurat, operasional kepegawaian dan kegiatan administrasi keuangan.

Selain pelayanan internal dalam kegiatan Layanan Perkantoran tersebut juga menyangkut layanan eksternal seperti jamuan bagi tamu, pemberian layanan bagi mitra kerja Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya.

Target yang ditetapkan tahun 2026 untuk indikator kegiatan ini adalah 100 (persen), dengan capaian pada TW I Tahun 2026 sebesar 100 (persen) dan realisasi dukungan anggaran sebesar Rp 142.653.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 34.053.200 atau 23,87%

Kegiatan yang dilakukan pada Tahun 2026 untuk mendukung pencapaian Indikator ini yaitu telah dilaksanakan monitoring dan pemantauan layanan perkantoran, layanan konsumsi rapat, layanan pimpinan.

Kendala yang dihadapi yaitu timeline dan rencana kegiatan rapat serta penggunaan peralatan yang rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun selanjutnya yaitu Meningkatkan koordinasi dengan Sekretaris pimpinan serta Pemanfaatan layanan konsumsi rapat serta peralatan pendukung rapat.

3.2.4.6. Persentase Penyelesaian Penyusunan SOP

Proses bisnis Kementerian Kelautan dan Perikanan telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Proses Bisnis Kementerian Kelautan dan perikanan yang bertujuan untuk mengatur dan mengoptimalkan proses bisnis di lingkungan KKP agar lebih efisien, efektif dan terintegrasi.

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana, dan oleh siapa dilakukan. Indikator ini mengukur capaian kinerja unit organisasi dalam penyelesaian SOP.

Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan tahapan lanjutan yang dilakukan setelah penyusunan Proses Bisnis (Probis) level 3 Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya. Pada tahap Probis level 3, organisasi telah menguraikan proses secara rinci hingga pada level aktivitas yang spesifik, sehingga memberikan gambaran alur kerja yang jelas, terstruktur dan terintegrasi.

Berdasarkan rincian tersebut, penyusunan SOP menjadi langkah berikutnya untuk menterjemahkan setiap aktivitas dalam Probis Level 3 ke dalam petunjuk operasional yang lebih teknis dan aplikatif. SOP disusun agar setiap proses dapat dilaksanakan secara konsisten, efektif dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Target IKU penyusunan IKU SOP Direktorat Prasarana dan Sarana tahun 2026 adalah 100%. Capaian IKU ini di hitung berdasarkan SOP yang disusun dibandingkan dengan jumlah seluruh SOP pada TW IV tahun 2026 yang harus di susun sesuai dengan matrik identifikasi SOP pendukung Probis Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya.

Tabel 3. 22. Persentase Penyelesaian Penyusunan SOP Triwulan I Tahun 2026

Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Prasarana dan Sarana								
IKU : Persentase Penyelesaian Identifikasi Penyusunan SOP (Persen)								
Realisasi Tahun 2022 -2026				Tahun 2026			Pertumbuhan 2025 -2026	Rata -rata Pertumbuhan 2022 - 2026
2022	2023	2024	2026	Target (Persen)	Realisasi (Persen)	% Capaian		
N/A	N/A	N/A	N/A	100	0	0	N/A	N/A

Rencana aksi yang akan dilakukan setiap Triwulan telah dilakukan identifikasi jadwal untuk penyelesaian SOP yang telah ditetapkan.

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Direktorat Prasarana dan Sarana merupakan salah satu unit kerja Eselon II di lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang prasarana dan sarana. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Prasarana dan Sarana berlandaskan kepada tujuan, sasaran dan program kerja yang telah diterapkan dalam Renstra KKP, Renstra DJPB dan kontrak kinerja antara Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya dengan Direktur dan/atau Pelaksana Tugas Direktur Prasarana dan Sarana. Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Ikan Air Payau periode Triwulan 1 tahun 2025 telah menyajikan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diperoleh selama periode Triwulan 1 tahun 2026. Terhadap capaian IKU tersebut dilakukan analisis.

Berdasarkan uraian pencapaian kinerja dalam Bab III, dari hasil analisis terhadap capaian kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana sampai akhir periode Triwulan 1 tahun 2026 dari total 15 (lima belas) indikator kinerja pendukung sasaran strategis memenuhi target yang telah ditetapkan.

4.2. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi atas kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana Triwulan 1 tahun 2026 sebagai upaya peningkatan kinerja pada triwulan berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

No	Hal yang Harus Diperbaiki	Rencana Tindak Lanjut
1	Perlu mempertahankan target - target indikator kinerja Utama (IKU) yang sudah tercapai	Melakukan monitoring dan pendokumentasian yang baik sehingga konsistensi pencapaian target kinerja dapat dipertahankan
2	Pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan rencana dan target kegiatan	Memastikan pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan berdasarkan rencana

No	Hal yang Harus Diperbaiki	Rencana Tindak Lanjut
		penarikan dana, agar kinerja di tahun berikutnya dapat tercapai sesuai target dan penyerapan anggaran dapat dilaksanakan sebaik mungkin